KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							

ONSE06MT

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 H.2						
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG									
A.1 NPWP : 94 923 756 4 727 000									
			<u> </u>						
A.2 N									
A.3 Nama : ANDRI BAGASWARA									
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG JUMLAH PENGHASILAN TARIF LEBIH									
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
	B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
	1	21-402-01		8.143.100	8.143.100	0	5	407.155	
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal Z 5 dd D 2 mm Z 0 2 2 yyyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor: Tanggal dd mm yyyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0								I TIMUD	
C.2									
C.3 C.4									
C.5	Tanggal	. [-] - 100 [-] -							
		Alama Penandatangan : HARI JUMADI Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya							
C.6	enyataan V	Tagan :	tandata Sesuai	ngani secara elektronik.	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak			·	